

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ginting, Darwin, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis; Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadikuma, H. Hilman, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hart, H.L.A., 2010, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Nusa Media, Bandung.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2014, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi, 2006, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Santoso, Urip, 2011, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Sari, Diana, 2016, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, H. Rochmat., 1990, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, PT Eresco, Bandung.
- Suandy, Erly, 2009, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumyar, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Thamrin, H. Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang PRESS INDO, Yogyakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2011, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wibawanti, Erna Sri dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*, Cetakan ke 1, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

B. Jurnal/ Artikel/Tesis

- Effendi, Rizal, “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Verawati, Refi, “Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Akta Pembagian Warisan (APW) dan Akta Pembagian Hak bersama (APHB) Di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2015 tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan karena Warisan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 102.

D. Internet

Cnn Indonesia, "Tax Amnesty Buka Banyak Kasus Pembayaran Pajak Berganda", <http://www.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 16 Agustus 2017

Departemen Perhubungan, "Memperjuangkan Penghapusan Pajak Berganda Dalam Industri Penerbangan", <http://www.dephub.go.id>, diakses tanggal 16 Agustus 2017

Evhhalen, "Kedudukan Surat Edaran Yang Dikeluarkan Oleh Eksekutif/Pemerintah Dalam Tatahan Hukum Indonesia", <http://www.google.com/amp/s/evhhalen.wordpress.com>, diakses tanggal 2 Desember 2018

Guru Pendidikan, "Pengertian dan Prinsip Rule of Law Menurut Para Ahli", <http://www.gurupendidikan.co.id>, diakses tanggal 18 Desember 2018

Guzasiah, Muhammad Aulia Y. "Resume General Principles And Limitation On Power To Make Tax Laws Dalam Chapter Legal Framework Of Taxation Dalam Buku Victor Thuronyi, 1996. Tax Law Design And Drafting Volume 1", <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 25 Januari 2019

Hukum Online, "Surat Edaran Kerikil Dalam Perundang-undangan", <http://www.m.hukumonline.com>, diakses tanggal 2 Desember 2018

Indonesia Corruption Watch, "Akar Masalah NPWP Ganda", <http://www.antikorupsi.org>, diakses tanggal 16 Agustus 2017

Nugraeni, Usti, "Double Taxation", <http://www.betherealagent.blogspot.co.id>, diakses tanggal 16 Agustus 2017

Wahdi, NS, "Pajak Berganda", <http://www.pajakinternasional.blogspot.co.id>, diakses tanggal 16 Agustus 2017